

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH

Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Dan Laporan Auditor Independen

Financial Statement as of

December 31, 2025 and December 31, 2024

and Independent Auditor's Report

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH

LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

*FINANCIAL STATEMENT
WITH THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR ENDED*

LAPORAN KEUANGAN INI DIBUAT DAN DISETUJUI OLEH DIREKSI
PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH
YANG AKAN DILAMPIRKAN SEBAGAI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

*THE FINANCIAL REPORT IS PRODUCED AND APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS
PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH
WHICH WILL BE ATTACHED AS AN INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*

Nama/Name: Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Koordinator / Coordinator

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH

Halaman
Pages

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Surat Pernyataan Direksi		<i>Statement of the Board of Directors</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Pokok		<i>Basic Financial Statement</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Penghasilan Komprehensif	2	<i>Statement of Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Neto	3	<i>Statement of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement Of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 19	<i>Notes to Financial Statements</i>

**Surat Pernyataan Manajemen
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan
PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION
WATCH
untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025**

**Board of Management's Statement
Regarding the Responsibility for Financial Statements
PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION
WATCH
for the Year Ended December 31st, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Alamat Kantor : Jl. Kalibata Timur IV D No. 6, Kalibata
Pancoran, Jakarta Selatan, 12740
Jabatan : Koordinator / *Coordinator*

We, the undersigned:
Name
Office Address
Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH;
2. Laporan keuangan PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH;*
2. *Financial statements of PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH has been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia*
3. a. *All information in the financial statements of PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH has been completely and correctly loaded;*
b. *Financial Statements of PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH does not contain incorrect material information or facts, and does not eliminate material information or facts;*
4. *Responsible for the internal control system in PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH.*

Jakarta, 26 Mei 2026 / *Jakarta, May 26th, 2026*

Atas Nama dan Mewakili Badan Pekerja

On behalf of and representing the Board of Managements

**KOMISI
MASYARAKAT
UNTUK
PENYELIDIKAN
KORUPSI**



Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Koordinator / *Coordinator*



Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Laporan/Report No. 00034/3.0502/AU.1/11/0533-1/1/VI/2026

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH**

**The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH**

Opini Wajar tanpa Pengecualian

Unqualified Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH financial statements, consisting of the statement of financial position as of December 31, 2025, as well as the income statement and other comprehensive income, the statement of changes in equity and the statement of cash flows for the year ended on that date, as well as notes to the financial statements, including an overview of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

In our opinion, the attached financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards.

Hal Audit Utama

Key Audit Matters

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami merupakan hal-hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The key audit matters identified in our audit is outlined below:

Prosedur audit kami mencakup, antara lain:

Our audit procedures include, among others:

- Pemeriksaan fisik aset dan bukti-bukti pendukung atas transaksi perolehan dan bukti-bukti kepemilikan aset;
- Pemeriksaan bukti-bukti pendukung atas transaksi perolehan dan bukti-bukti pendapatan.
- Menilai kecukupan pengungkapan yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

- Physical examination of assets and supporting evidence of acquisition transactions and evidence of asset ownership;
- Examination of supporting evidence of acquisition transactions and proof of income.
- Assess the adequacy of disclosures presented in the notes to the financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.



Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Independent Auditors' Report (Continued)

Laporan/Report No. 00034/3.0502/AU.1/11/0533-1/1N/2026

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensi material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.



Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Independent Auditors' Report (Continued)

Laporan/Report No. 00034/3.0502/AU.1/11/0533-1/11/2026

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Independent Auditors' Report (Continued)

Laporan/Report No. 00034/3.0502/AU.1/11/0533-1/1N/2026

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit Perusahaan. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the



KUMALAHADI, SUGENG PAMUDJI & REKAN - Cabang Depok

Registered, Public Accountants KMK Nomor 568/KM.1/2024
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik-Cabang Nomor 588/KM.1/2024

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Independent Auditors' Report (Continued)

Laporan/Report No. 00034/3.0502/AU.1/11/0533-1/11/2026

menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik
Kumalahadi Sugeng Pamudji & Rekan


Hary Suganda, SE, Ak., CA., CPA., BKP., CFI

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP 0533
Depok, 26 Mei 2026/*May 26th, 2026*



PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
Per 31 December 2025 dan 31 December 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
For The Year Ended
As Of December 31, 2025 and December 31, 2024
(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2025</u>	<u>Catatan</u> <i>Notes</i>	<u>2024</u>	
ASET				ASSETS
<u>Aset Lancar</u>				<u>Current Assets</u>
Kas dan Setara Kas	28.557.748.141	3	21.648.089.895	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Piutang Usaha	50.000.000	4	50.000.000	<i>Account Receivable</i>
Piutang Karyawan	194.509.910	5	303.997.356	<i>Employee Receivables</i>
Uang Muka Program	130.747.965	6	307.154.399	<i>Advances Program</i>
Beban Dibayar Di Muka	-	7	4.193.763.832	<i>Prepaid Expense</i>
Jumlah Aset Lancar	<u>28.933.006.016</u>		<u>26.503.005.482</u>	<i>Total Current Assets</i>
<u>Aset Tidak Lancar</u>				<u>Non-Current Assets</u>
Investasi	3.010.000.000	8	3.010.000.000	<i>Investment</i>
Aset Tetap				<i>Fixed Assets</i>
Harga perolehan aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp. 6.664.920.365,- pada tahun 2025 dan Rp. 5.286.727.613,- pada tahun 2024.)	9.176.906.313	9	10.489.653.390	<i>Fixed asset acquisition price (net of accumulated depreciation Rp. 6.664.920.365,- in 2025 and Rp. 5.286.727.613,- in 2024.)</i>
Jumlah Aset Tetap	<u>9.176.906.313</u>		<u>10.489.653.390</u>	<i>Total Fixed Assets</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>12.186.906.313</u>		<u>13.499.653.390</u>	<i>Total Non-Current Assets</i>
JUMLAH ASET	<u>41.119.912.329</u>		<u>40.002.658.872</u>	<i>TOTAL ASSETS</i>
KEWAJIBAN & ASET NETO				<i>LIABILITIES & NET ASSETS</i>
LIABILITAS				<i>LIABILITIES</i>
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>				<u>Current Liabilities</u>
Liabilitas Lancar	243.769.670	10	490.574.936	<i>Current Liabilities</i>
Pendapatan Diterima Di Muka	-	11	4.193.763.832	<i>Unearned Revenue</i>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>243.769.670</u>		<u>4.684.338.768</u>	<i>Total Current Liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS	<u>243.769.670</u>		<u>4.684.338.768</u>	<i>TOTAL LIABILITIES</i>
ASET NETO				<i>NET ASSETS</i>
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	34.494.669.840	12	33.743.354.931	<i>Without Restrict From Resources Providers</i>
Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	6.381.472.819		1.574.965.173	<i>With Restrictions From Resources Providers</i>
JUMLAH ASET NETO	<u>40.876.142.659</u>		<u>35.318.320.104</u>	<i>TOTAL NET ASSETS</i>
JUMLAH KEWAJIBAN & ASET NETO	<u>41.119.912.329</u>		<u>40.002.658.872</u>	<i>TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS</i>

Jakarta, 26 Mei 2026 / Jakarta, May 26th, 2026



Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Koordinator / Coordinator

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan / See the notes to the financial statements which are an inseparable part of the overall financial statements

	<u>2025</u>	Catatan	<u>2024</u>	
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA				WITH RESTRICTIONS FROM RESOURCE PROVIDERS
PENERIMAAN		13		RECEIPTS
Penerimaan dari Grantor	16.521.269.433		14.900.143.294	Receipt from Grantors
Penerimaan Lain-lain dari Program	129.569.322		52.360.163	Other Receipts from Programs
JUMLAH PENERIMAAN	<u>16.650.838.755</u>		<u>14.952.503.457</u>	TOTAL RECEIPTS
PENGELUARAN		14		EXPENDITURES
Pengeluaran Program	11.573.852.731		14.404.312.347	Program Expenditure
JUMLAH PENGELUARAN	<u>11.573.852.731</u>		<u>14.404.312.347</u>	TOTAL EXPENDITURES
SURPLUS (DEFISIT)	<u>5.076.986.024</u>		<u>548.191.110</u>	SURPLUS (DEFICIT)
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA				WITHOUT RESTRICTIONS FROM RESOURCE PROVIDERS
PENERIMAAN	5.554.720.614	15	6.188.982.518	RECEIPTS
JUMLAH PENERIMAAN	<u>5.554.720.614</u>		<u>6.188.982.518</u>	TOTAL RECEIPTS
PENGELUARAN		16		EXPENDITURES
Operasional	5.402.450.389		6.773.338.961	Operational
JUMLAH PENGELUARAN	<u>5.402.450.389</u>		<u>6.773.338.961</u>	TOTAL EXPENDITURES
SURPLUS (DEFISIT)	<u>152.270.225</u>		<u>(584.356.443)</u>	SURPLUS (DEFICIT)
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT)	<u><u>5.229.256.249</u></u>		<u><u>(36.165.333)</u></u>	TOTAL SURPLUS (DEFICIT)

Jakarta, 26 Mei 2026 / Jakarta, May 26th, 2026



The logo of the Indonesia Corruption Watch (ICW) is displayed, featuring the acronym 'ICW' in large blue letters with a red and white graphic element. Below the logo, the full name 'INDONESIA CORRUPTION WATCH' is written in smaller red letters. A handwritten signature in black ink is overlaid on the logo.

Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Koordinator / Coordinator

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 December 2025 dan 31 December 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
For The Year Ended
December 31, 2025 and December 31, 2024
(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tanpa Pembatasan / Without Restrictions	Dengan Pembatasan / With Restrictions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Saldo per 31 December 2023	32.380.651.538	2.443.917.351	34.824.568.889	Balance as of December 31, 2023
Aset Neto yang dibebaskan dari pembatasan	1.417.143.288	(1.417.143.288)	-	<i>Net Assets exempt from restriction</i>
Koreksi Aset Neto	529.916.548	-	529.916.548	<i>Net Assets Correction</i>
Surplus (Defisit) 2024	(584.356.443)	548.191.110	(36.165.333)	<i>Surplus (Deficit) 2024</i>
Saldo per 31 December 2024	33.743.354.931	1.574.965.173	35.318.320.104	Balance as of December 31, 2024
Aset Neto yang dibebaskan dari pembatasan	270.478.378	(270.478.378)	-	<i>Net Assets exempt from restriction</i>
Koreksi Aset Neto	328.566.306	-	328.566.306	<i>Net Assets Correction</i>
Surplus (Defisit) 2025	152.270.225	5.076.986.024	5.229.256.249	<i>Surplus (Deficit) 2025</i>
Saldo per 31 December 2025	34.494.669.840	6.381.472.819	40.876.142.659	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan /
See the notes to the financial statements which are an inseparable part of the overall financial statements

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 December 2025 dan 31 December 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2025 and December 31, 2024
(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Surplus (Defisit) tahun berjalan	5.229.256.249	(36.165.333)	<i>Surplus (Deficit) of the year</i>
Penyesuaian Aset Bersih	328.566.306	529.916.548	<i>Net Assets Adjustment</i>
Penyesuaian beban penyusutan	1.378.192.752	1.381.277.171	<i>Depreciation</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Piutang Usaha	-	85.000.000	<i>Account Receivable</i>
Piutang Karyawan	109.487.446	(64.629.864)	<i>Employee Receivables</i>
Uang Muka Program	176.406.434	(101.699.984)	<i>Advances Program</i>
Beban Dibayar Di Muka	4.193.763.832	(1.800.929.632)	
Liabilitas Lancar	(246.805.266)	(116.068.174)	<i>Current Liabilities</i>
Pendapatan Diterima Di Muka	(4.193.763.832)	1.735.009.632	<i>Unearned Revenue</i>
Arus Kas Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	<u>39.088.614</u>	<u>(263.318.022)</u>	Cash Flows Generated from Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES
(Penambahan) Pengurangan Aset Tetap	(65.445.675)	(106.853.251)	<i>(Additions) Deductions Fixed Assets</i>
Investasi	-	50.000.000	<i>Investment</i>
Arus Kas Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Investasi	<u>(65.445.675)</u>	<u>(56.853.251)</u>	Cash Flows Generated from Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Arus Kas Yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>	Cash Flow Generated from Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	6.909.658.246	1.554.857.113	NET INCREASE (DECREASE) CASH AN CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	21.648.089.895	20.093.232.782	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u><u>28.557.748.141</u></u>	<u><u>21.648.089.895</u></u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan / See the notes to the financial statements which are an inseparable part of the overall financial statements

1. UMUM

a Pendirian

PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (Perkumpulan) didirikan berdasarkan akta notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., Nomor 53 Tanggal 11 Juni 2009, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan . Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan akta notaris Evi Yuniarti, S.H., M.Kn, Nomor 04 Tanggal 07 Agustus 2025, Notaris di Depok dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No AHU-0001404.AH.01.08.TAHUN 2025, tanggal 08 Agustus 2025.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perkumpulan telah memperoleh perizinan dari pemerintah daerah setempat berupa Surat Pengukuhan Kena Pajak dengan Nomor: PEM-03211/WPJ.04/KP.0803/2009 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.960.739.9-061.000.

b Lokasi Perkumpulan

Perkumpulan berdomisili di alamat Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 RT 010 RW 008, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12740.

c Maksud dan Tujuan

Perkumpulan berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi, Keterbukaan, dan Tanggungjawab.

Misi ICW adalah bersama rakyat dalam:

1. Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuat partisipasi rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
2. Memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender.

Untuk mencapai visi dan misi ICW melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Memfasilitasi dan menguatkan gerakan rakyat (terorganisir) untuk memberantas korupsi dan memperjuangkan hak-hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
- Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

1. GENERAL

a Establishment

PERKUMPULAN INDONSEIA CORRUPTION WATCH (The Association) was established based on the notary deed of H. Rizul Sudarmadi, S.H., Number 53 dated June 11, 2009, Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a decree. The deed of establishment has undergone several changes and the last one is based on the notary deed of Evi Yuniarti, S.H., M.Kn, Number 04 dated August 7, 2025, Notary in Depok and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in a decree No. AHU-0001404. AH.01.08.YEAR 2025, dated August 08, 2025.

In carrying out its business activities, the Association has obtained a license from the local government in the form of a Taxable Confirmation Letter with Number: PEM-03211/WPJ.04/KP.0803/2009 and Taxpayer Identification Number (NPWP): 01.960.739.9-061.000.

b Association Location

The association is domiciled at Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 RT 010 RW 008, Kalibata, Pancoran, South Jakarta, DKI Jakarta, 12740.

c Purpose and Objectives

The association is based on Pancasila, the 1945 Constitution, Democracy, Openness, and Responsibility.

ICW's mission is with the people in:

1. *Integrating the anti-corruption agenda to strengthen the organized participation of the people in the process of making and supervising public policies.*
2. *Empowering potential actors to realize political, legal, economic, and bureaucratic systems that are free from corruption and based on social justice and gender.*

To achieve its vision and mission, ICW carries out the following activities:

- *Facilitating and strengthening the (organized) people's movement to eradicate corruption and fight for the rights of citizens in obtaining better quality public services.*
- *Facilitate the strengthening of the capacity of strategic groups in the process of making and supervising public policies.*

1. UMUM - LANJUTAN

c **Maksud dan Tujuan - Lanjutan**

Untuk mencapai visi dan misi ICW melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitra jaringan dalam mengungkap, melaporkan kasus korupsi, dan memantau penegakan hukum.
- Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
- Mempromosikan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi.
- Menyebarkan gagasan dan instrumen antikorupsi kepada kelompok rakyat yang terorganisir di berbagai sektor untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan.
- Mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen, dan penegak hukum untuk membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan.
- Mendorong konsolidasi dalam meningkatkan dan memperbaiki mobilisasi sumber daya dalam gerakan antikorupsi.

d **Manajemen Perkumpulan**

Berdasarkan Akta Notaris Evi Yuniarti, S.H., M.Kn, Nomor 04 Tanggal 07 Agustus 2025, Notaris di Depok yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No AHU-0001404.AH.01.08.TAHUN 2025, tanggal 08 Agustus 2025, dan merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Indonesia Corruption Watch Nomor: 02/SK/BP/ICW/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, adalah sebagai berikut:

Badan Pengurus

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Sely Martini
Adnan Topan Husodo
Luky Djuniardi Djani
Bivitri Susanti
Yohanes Danang Widoyoko
P Bambang Wisudo
Ade Irawan
Dr. Irma Hidayana S.Fil., M.P.H.

Badan Pengawas

Ketua
Anggota
Anggota

Emerson Yuntho, S.H.
Dadang Tri Sasongko
Dra. Ani Soejipto. M.A.

Badan Pekerja

Koordinator
Wakil Koordinator

Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Siti Juliantari Rachman

1. GENERAL - CONTINUED

c **Purpose and Objectives - Continued**

To achieve its vision and mission, ICW carries out the following activities:

- Improve the initiative and quality of community participation and network partners in uncovering corruption cases, and monitoring law enforcement.
- Mobilize public campaigns to urge legal, political, and bureaucratic reforms that are conducive to the eradication of corruption.
- Promote policies that support the eradication of corruption.
- Disseminate anti-corruption ideas and instruments to organized people's groups in various sectors to increase the effectiveness of eradication.
- Encourage potential actors in government, parliament, and law enforcement to open up space for public participation in changing policies.
- Encourage consolidation in improving and improving resource mobilization in the anti-corruption movement.

d **Association's Management**

Based on the Notary Deed of Evi Yuniarti, S.H., M.Kn, Number 04 dated August 7, 2025, Notaries in Depok who have received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0001404. AH.01.08.OF 2025, dated August 08, 2025, and is a follow-up to the Decree of the Governing Body of the Indonesian Corruption Watch Association Number: 02/SK/BP/ICW/II/2025 dated February 28, 2025, is as follows:

Executive Board

Chairperson
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Supervisory Board

Chairperson
Member
Member

Working Committee

Coordinator
Co Coordinator

**PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan gabungan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Teknis penyusunan dan pelaporan keuangan Perkumpulan Indonesia Corruption Watch mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, yang merupakan pembaruan dari ISAK Nomor 35.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
YANG DITERAPKAN**

a. Dasar Penyusunan laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dan konsep kelangsungan usaha (*going concern*). Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*).

Laporan keuangan Perkumpulan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perkumpulan menyajikan laporan penghasilan komprehensif dan laporan perubahan aset neto secara tersendiri.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perkumpulan adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam Rupiah, kecuali dijelaskan lain.

Pembukuan Perkumpulan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

c. Pengakuan Penerimaan

Penerimaan donasi dan kontribusi diakui sebagai pendapatan pada saat dana diterima atau ketika hak atas pendapatan tersebut diperoleh secara sah, sepanjang jumlahnya dapat diukur secara andal dan terdapat keyakinan bahwa manfaat ekonominya akan diterima oleh entitas. Donasi tanpa pembatasan dari pemberi kontribusi diakui sebagai pendapatan tanpa pembatasan dan dicatat sebagai bagian dari aset neto tidak terikat.

**STATEMENT OF COMPLIANCE WITH THE
PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The combined financial statements are prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The financial reporting practices of the Indonesian Corruption Watch Association refer to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) No. 335: Presentation of Financial Statements for Nonprofit-Oriented Entities, which is an update of ISAK No. 35

**2. OVERVIEW OF IMPORTANT ACCOUNTING
POLICIES APPLIED**

a. Basis For The Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared on the accrual basis and under the going concern assumption. The statement of cash flows is presented using the indirect method.

The Association's financial statements consist of balance sheets, income statements, statements of changes in equity, cash flow statements and notes to financial statements. The Association presents a statement of income and statement of equity changes separately.

b. Reporting Currency, Transactions and Balances in Foreign Currencies

The reporting currency used by the Association is the rupiah currency, as well as a functional currency. All transactions and account balances are presented in rupiah, unless otherwise explained.

The Association's bookkeeping is held in rupiah. While transactions in foreign currencies are translated into rupiah in cash rates at the time of the transaction.

On the reporting date, the balance of assets and monetary obligations in foreign currencies is translated into rupiah using the exchange rate that is valid on that date. Profit or loss of exchange rate differences that arise are charged or credited in the current year's income statement (loss).

c. Recognition of Receipt

Receipt of donations and contributions is recognized as income at the time the funds are received or when the right to such income is lawfully obtained, as long as the amount can be measured reliably and there is a belief that the economic benefits will be received by the entity. Unrestricted donations from contributors are recognized as unrestricted income and are recorded as part of unrestricted net assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - LANJUTAN

c. Pengakuan Penerimaan - Lanjutan

Donasi atau hibah yang memiliki pembatasan penggunaan, baik berdasarkan waktu maupun tujuan tertentu, awalnya diakui sebagai aset neto terikat dan direklasifikasi menjadi aset neto tidak terikat setelah pembatasan tersebut terpenuhi.

Pendapatan bunga dari simpanan bank atau deposito diakui secara akrual sesuai dengan periode berlakunya. Penerimaan dari jasa layanan program diakui ketika jasa atau kegiatan telah dilaksanakan dan manfaat ekonomisnya dapat diukur secara andal.

d. Penerimaan dan Pengeluaran

Seluruh dana yang diterima, baik yang berasal dari kontribusi donatur maupun pendapatan bunga bank, diakui sebagai penerimaan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Seluruh beban yang timbul, termasuk beban yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan serta biaya administrasi bank, diakui sebagai pengeluaran saat terjadinya.

e. Pajak Penghasilan

Perkumpulan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perkumpulan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perkumpulan tidak mengakui pajak tangguhan.

Kami tidak mengaudit pajak Perkumpulan.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

g. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

2. OVERVIEW OF IMPORTANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED - CONTINUED

c. Recognition of Receipt - Continued

Donations or grants that have restrictions on use, whether based on time or specific purposes, are initially recognized as tied net assets and reclassified as unbound net assets once those restrictions are met.

Interest income from bank deposits is recognized on an accrual basis according to the validity period. Revenue from program services is recognized when the service or activity has been implemented and its economic benefits can be reliably measured.

d. Receipts and Expenditure

All funds received, both from donor contributions and bank interest income, are recognized as receipts in accordance with accrual-based accounting principles. All expenses incurred, including expenses related to the implementation of the program of activities and bank administrative costs, are recognized as expenses when they occur.

e. Income Tax

The Association recognizes the obligation to all income tax on the current period and previous periods that have not been paid. If the amount paid for the current period and the previous period exceeds the amount owed for that period, the Association must recognize the excess as an asset. The Association does not recognize deferred tax.

We do not audit Association taxes.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash, deposits that can be disbursed at any time and other short-term liquid investments with a period of three months or less.

Cash and time deposits that are restricted to use, are presented as "assets that are restricted" which is categorized as owned until maturity, which is when it is limited to its use.

g. Accounts Receivable

Trade receivables are presented at the amount of net after deducting the impairment formed by the estimated allowance for uncollectible receivables. Impairment is determined by paying attention to among others experience, business prospects and industry, financial conditions with emphasis on cash flow, the ability to pay debtors, and collateral that are controlled. Accounts receivable are presented according to receivables who have special relations and third party receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - LANJUTAN

h. Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan atau diterima di muka untuk barang dan jasa. Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan. Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*).

i. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurang akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan penghasilan komprehensif, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan aset berdasarkan ISAK Nomor 335.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Tahun / Year</u>
Bangunan	10 s/d 40
Peralatan Kantor	4 s/d 8

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

2. OVERVIEW OF IMPORTANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED - CONTINUED

h. Prepaid Expenses and Advances

An advance is a part of a contract that is paid or received in advance for goods and services. The advance is recorded as an asset on the financial position statement. Prepaid expenses are amortized over the useful life of each cost using the Straight Line Method.

i. Fixed Assets

Fixed assets are presented at cost after accumulation of depreciation and impairment. The acquisition fee includes the purchase price of fixed assets including costs that can be directly attributed to bring assets to locations and conditions that are ready to be used and initial estimates of asset demolition costs, asset transfer costs and relocation restoration costs. Credited taxes and all discounts are deducted in determining acquisition costs. Revaluation of fixed assets is not permitted, unless it is carried out based on government regulations. depreciation begins when fixed assets are available for use and stop when fixed assets are abolished. depreciation does not stop when the asset is not used. Depreciation is recognized as a burden in the income statement, except to meet the requirements to be capitalized as the acquisition of assets based on ISAK Number 335.

The depreciation of the fixed assets is carried out using the straight line method based on the estimated economic useful life with the following details:

<u>Tahun / Year</u>	
10 s/d 40	<i>Buildings</i>
4 s/d 8	<i>Office Equipments</i>

Expenditures for repairs and maintenance are charged to the income statement at the time of occurrence. Expenditures that extend the useful life or provide economic benefits in the future in the form of capacity building, production quality or improved performance standards.

Fixed assets that are no longer used or sold, expelled from the group of fixed assets concerned and profit or loss arising are credited or charged to operation of the current year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - LANJUTAN

j. Penurunan Nilai Aset

Perkumpulan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perkumpulan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

k. Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Di Muka mencerminkan kewajiban entitas untuk memberikan barang atau jasa kepada pelanggan di masa mendatang sesuai dengan ketentuan perjanjian. Pengakuan pendapatan diterima di muka dilakukan pada saat 'invoice diterbitkan dan dana diterima, serta akan diakui sebagai pendapatan pada periode ketika manfaat ekonomi terkait telah direalisasi atau kewajiban kinerja telah terpenuhi.

l. Aset Bersih

Aset bersih merupakan surplus atau defisit pendapatan atas biaya untuk setiap periode. Saldo aset bersih Dana Terikat dapat dipindahkan ke Dana Tidak Terikat berdasarkan permintaan Sekretaris Jenderal dan persetujuan pemberi dana.

Perkumpulan menyajikan hibah atau wakaf dalam bentuk kas atau aktiva lain-lain sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aktiva tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kedaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aktiva bersih terikat temporer digolongkan kembali menjadi aktiva bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aktiva bersih yang dibebaskan dari pembatasan.

Organisasi menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan dan peralatan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dari penyumbang. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan eksplisif yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan.

Jika tidak ada pembatasan tersebut dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aktiva tetap tersebut. Pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aktiva tetap tersebut dimanfaatkan.

2. OVERVIEW OF IMPORTANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED - CONTINUED

j. Decline in Asset Value

The Association at each reporting date assesses whether there are indications of an impairment of assets sourced from internal and external information, which is carried out based on cash-producing asset groups. If the indication exists, the Association estimates that the fair value of assets is reduced by selling costs. The impairment loss of asset value is recognized if the fair value is reduced by the cost of selling lower than the carrying value. Recovery of impairment losses of asset value is recognized in the income statement must not exceed the carrying amount without impairment losses.

k. Unearned Revenue

Unearned revenue reflects the entity's obligation to provide goods or services to customers in the future in accordance with the terms of the agreement. Recognition of unearned revenue is made at the time of the invoice being issued and funds are received, and will be recognized as income in the period when the associated economic benefits have been realized or performance obligations have been met.

l. Net Assets

Net assets are a surplus or deficit of income over expenses for each period. The balance of net assets of the Bonded Fund may be transferred to the Non-Bonded Fund upon the request of the Secretary General and the approval of the funder.

The Association presents a grant or waqf in the form of cash or other assets as a binding donation if the grant or waqf is received with conditions that limit the use of the asset. If the donor's restriction has expired, i.e. by the time the restriction period has expired or the purpose restriction has been met, the temporary bound net assets are reclassified as unbound net assets and presented in the activity report as net assets exempt from the restrictions.

Organizations that present grants or waqf in the form of land, buildings and equipment as donations are not bound unless there are restrictions that explicitly state the purpose of the use of the assets from the donor. Grants or waqfs for fixed assets with explicit restrictions stating the purpose of the use of the asset and donations in the form of cash or other assets that must be used to acquire fixed assets are presented as donations.

If there is no such restriction from the donor regarding the limitation of the period of use of the fixed asset. The exemption of restrictions is reported at the time the fixed asset is utilized.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
YANG DITERAPKAN - LANJUTAN**

m. Donatur

Selama 2025 dan 2024, Perkumpulan menerima dana dari:

- FORD Foundation
- International Foundation for Electoral Systems (IFES)

- Integritas
Internews Network
- Open Contracting Partnership (OCP)
- The Asia Foundation Demres (TAF)
- Open Society Foundation London (OSF)
- Tara Climate Ltd.

n. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode merupakan peristiwa - peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian pelaporan. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam PSAK 8 "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan".

**2. OVERVIEW OF IMPORTANT ACCOUNTING
POLICIES APPLIED - CONTINUED**

m. Grantors

During 2025 and 2024, the Association received funding from:

- *FORD Foundation*
- *International Foundation for Electoral Systems (IFES)*

- *Integritas
Internews Network*
- *Open Contracting Partnership (OCP)*
- *The Asia Foundation Demres (TAF)*
- *Open Society Foundation London (OSF)*
- *Tara Climate Ltd.*

n. Events after the end of the reporting period

Post-period events are events, both favorable and unfavorable, that occur after the end of the reporting period up to the reporting completion date. In accordance with PSAK 8 "Events After the Reporting Period".

3 Kas dan Setara Kas			Cash and Cash Equivalents 3
	2025	2024	
Akun ini terdiri dari:			This account consists of:
Kas			Cash on Hand
Kas Kecil	-	-	Petty Cash
Bank			Cash in Bank
Rupiah			Rupiahs
PT Bank Negara Indonesia Tbk.	24.317.785.741	17.512.703.520	PT Bank Negara Indonesia Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.	2.405.123.574	2.332.721.923	PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	428.594.739	424.778.275	
PT Bank Mandiri Tbk.	431.672.192	403.812.249	
Dollar Amerika Serikat			
BNI-0004449860	792.630.866	791.574.355	BNI-0004449860
Euro			
BNI-0004449871	181.941.029	182.499.573	BNI-0004449871
Jumlah Kas dan Setara Kas	28.557.748.141	21.648.089.895	

Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak memelihara kas di tangan (*cash on hand*). Seluruh transaksi kas dilakukan melalui rekening bank untuk memastikan pengelolaan kas yang lebih aman, terdokumentasi, dan sesuai dengan prosedur internal pengendalian keuangan. Hal ini telah menjadi kebijakan Perkumpulan.

The Indonesian Corruption Watch Association (ICW) does not maintain cash on hand. All cash transactions are conducted through bank accounts to ensure safed cash management, proper documentation, and compliance with internal financial control procedures. This has been established as the Association's policy.

4 Piutang Usaha			Account Receivable 4
	2025	2024	
Akun ini terdiri dari:			This account consists of:
Program Lain	50.000.000	50.000.000	Other Program
Jumlah Piutang Usaha	50.000.000	50.000.000	Total Account Receivable

5 Piutang Karyawan			Employee Receivables 5
	2025	2024	
Akun ini terdiri dari:			This account consists of:
Piutang Karyawan	194.509.910	303.997.356	Employee Receivables
Jumlah Piutang Karyawan	194.509.910	303.997.356	Total Employee Receivables

Piutang Karyawan merupakan pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan jangka waktu dan tingkat bunga tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus. Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan karyawan dan akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran yang telah disepakati bersama.

Employee Receivables are loans given to employees with a certain term and interest rate as determined by the Management Board. The loan is intended to support the needs of employees and will be settled through a mutually agreed payment mechanism.

6 Uang Muka Program **Advances Program 6**

	2025	2024	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Fundraising	-	12.464.600	<i>Fundraising</i>
IFES	-	3.364.880	<i>IFES</i>
Internews	-	20.555.096	<i>Internews</i>
OCP	80.923.500	25.952.499	<i>OCP</i>
Integritas	-	120.284.543	<i>Integritas</i>
OSF	-	16.655.281	<i>OSF</i>
TARA	22.586.965	60.375.000	<i>TARA</i>
Lain-lain	27.237.500	47.502.500	<i>Others</i>
Jumlah Uang Muka Program	130.747.965	307.154.399	Total Advances Program

Uang Muka Program merupakan dana yang telah disalurkan oleh entitas kepada pelaksana kegiatan, mitra pelaksana, atau pihak ketiga terkait pelaksanaan program tertentu yang didanai oleh donor, namun hingga tanggal laporan keuangan, belum terdapat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara final.

Program Advances is a fund that has been distributed by an entity to the implementation of activities, implementing partners, or third parties related to the implementation of certain programs funded by donors, but until the date of the financial statements, there has been no final accountability report on the use of funds.

7 Jumlah Beban Dibayar Di Muka **Total Prepaid Expense 7**

	2025	2024	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Integritas	-	3.603.448.299	<i>Integritas</i>
Internews	-	350.205.533	<i>Internews</i>
TARA	-	151.950.000	<i>TARA</i>
IFES	-	88.160.000	<i>IFES</i>
Jumlah Jumlah Beban Dibayar Di Muka	-	4.193.763.832	Total Total Prepaid Expense

8 Investasi **Investment 8**

		2024	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Koperasi	2.000.000.000	2.000.000.000	<i>Cooperative</i>
Obligasi SUN	1.000.000.000	1.000.000.000	<i>Government Bonds</i>
PT Visi-Integritas Nusantara	10.000.000	10.000.000	<i>PT Visi-Integritas Nusantara</i>
Jumlah Investasi	3.010.000.000	3.010.000.000	Total Investment

Koperasi Makmur Jaya

Merupakan dana dalam bentuk simpanan berjangka sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan. Atas simpanan tersebut, Perkumpulan akan memperoleh imbal hasil sebesar 11% pertahun dari jumlah simpanan.

Represents funds in the form of term deposits of IDR 2,000,000,000 with a term of 36 months. For these deposits, the Association will receive a yield of 11% per year of the deposit amount.

Saham pada PT Visi Integritas Nusantara

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Visi Integritas Nusantara, ditetapkan bahwa kepemilikan saham Perkumpulan Indonesia Corruption Watch yang sebelumnya sebesar 60% menjadi sebesar 10% dikarenakan telah dilakukan penjualan.

Based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Visi Integritas Nusantara, it was determined that the share ownership of the Indonesia Corruption Watch Association from 60% to 10% due to the sale.

8 Investasi - Lanjutan

Investment - Continued 8

Obligasi SUN

Government Bonds

Investasi ini merupakan investasi atas obligasi, berupa Surat Utang Negara (SUN) dengan jangka waktu dan tingkat bunga sebagai berikut:

It is an investment on Government Bonds (SUN) with the following terms and interest rates:

Penjual	: Bank Mandiri	<i>Seller</i>	: <i>Mandiri Bank</i>
Pembeli	: Supitriyani -untuk dan atas nama Indonesia Corruption Watch	<i>Buyer</i>	: <i>Supitriyani -for and on behalf of Indonesia Corruption Watch</i>
Instrumen	: FR88	<i>Instrument</i>	: <i>FR88</i>
Penerbit Instrumen	: Kemenkeu RI	<i>Publishing</i>	: <i>Kemenkeu RI</i>
		<i>Instrument</i>	
ISIN Code	: IDG000018201	<i>ISIN Code</i>	: <i>IDG000018201</i>
Jatuh Tempo	: 15 Juni 2036	<i>Due Date</i>	: <i>June 15, 2026</i>
Kupon Bunga	: 6,25%	<i>Interest Coupon</i>	: <i>6,25%</i>
Nominal	: IDR 1.000.000.000,-	<i>Nominal</i>	: <i>IDR 1.000.000.000,-</i>
Harga Jual Bank	: 100,10%	<i>Bank Selling Price</i>	: <i>100,10%</i>
Yield	: 6,24%	<i>Yield</i>	: <i>6,24%</i>
Principal	: IDR 1.000.000.000,-	<i>Principal</i>	: <i>IDR 1.000.000.000,-</i>
Instruksi	: Delivery Versus-Payment	<i>Completion</i>	: <i>Delivery Versus-Payment</i>
Penyelesaian		<i>Instructions</i>	

9 Aset Tetap

Fixed Assets 9

	2025				
	<i>Saldo Awal / Beginning Balance</i>	<i>Penambahan / Additions</i>	<i>Pengurangan / Deductions</i>	<i>Saldo Akhir / Ending Balance</i>	
Nilai Perolehan					Historical Value
Bangunan	12.308.333.333	-	-	12.308.333.333	<i>Buildings</i>
Peralatan Kantor	3.468.047.670	-	-	3.533.493.345	<i>Office Equipments</i>
Jumlah Nilai Perolehan	15.776.381.003	-	-	15.841.826.678	Total Historical Value
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	3.537.916.668	615.416.666	-	4.153.333.334	<i>Buildings</i>
Peralatan Kantor	1.748.810.945	762.776.086	-	2.511.587.031	<i>Office Equipments</i>
Jumlah Akumulasi Penyusutan	5.286.727.613	1.378.192.752	-	6.664.920.365	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	10.489.653.390			9.176.906.313	Book Value

9 Aset Tetap - Lanjutan					Fixed Assets - Continued 9
2024					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Nilai Perolehan					Historical Value
Bangunan	12.308.333.333	-	-	12.308.333.333	<i>Buildings</i>
Peralatan Kantor	3.468.047.670	-	-	3.468.047.670	<i>Office Equipments</i>
Jumlah Nilai Perolehan	15.776.381.003	-	-	15.776.381.003	Total Historical Value
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	2.922.500.001	615.416.667	-	3.537.916.668	<i>Buildings</i>
Peralatan Kantor	982.950.442	765.860.503	-	1.748.810.945	<i>Office Equipments</i>
Jumlah Akumulasi Penyusutan	3.905.450.443	1.381.277.170	-	5.286.727.613	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	11.870.930.560			10.489.653.390	Book Value
<hr/>					
10 Liabilitas Lancar					Current Liabilities 10
	2025	2024			
Akun ini terdiri dari:					This account consists of:
PPH Pasal 21	22.805.413	251.945.416			<i>Income Tax 21</i>
PPH Pasal 23	2.467.105	6.153.300			<i>Income Tax 23</i>
Deposit	166.851.500	131.901.500			<i>Deposit</i>
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	51.645.652	100.574.720			<i>Accrued Expenses</i>
Jumlah Liabilitas Lancar	243.769.670	490.574.936			Total Current Liabilities
<hr/>					
11 Pendapatan Diterima Di Muka					Unearned Revenue 11
	2025	2024			
Akun ini terdiri dari:					This account consists of:
Integritas	-	3.603.448.299			<i>Integritas</i>
Internews	-	350.205.533			<i>Internews</i>
TARA	-	151.950.000			<i>TARA</i>
IFES	-	88.160.000			<i>IFES</i>
Jumlah Pendapatan Diterima Di Muka	-	4.193.763.832			Total Unearned Revenue
<hr/>					
12 Aset Neto					Net Assets 12
	2025	2024			
Akun ini terdiri dari:					This account consists of:
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya					Without Restrictions From Resources Providers
Dana Cadangan Likuiditas	14.022.857.384	13.957.411.709			<i>Liquidity Fund</i>
Dana Cadangan Karyawan	3.574.452.931	3.369.659.045			<i>Staff Endowment Fund</i>
Lembaga	13.643.897.702	13.300.222.081			<i>Institution</i>
Fundraising	3.253.461.823	3.116.062.096			<i>Fundraising</i>
Surplus (Defisit) Aktivitas Tanpa Pembatasan Tahun Berjalan	-	-			<i>Current Year Surplus (Deficit) of Unrestricted Activities</i>
Jumlah Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	34.494.669.840	33.743.354.931			Total Net Assets Without Restrictions From Resources Providers

12 Aset Neto - Lanjutan			12
	2025	2024	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Jumlah Aset Neto Pindahan	34.494.669.840	33.743.354.931	<i>Net Assets Amount Moved</i>
Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya			<i>With Restrictions From Resources Providers</i>
FORD	3.759.976.870	-	FORD
UNODC	338.922	-	UNODC
IFES	240.366.301	49.251.977	IFES
TARA 2024	(205.547.532)	-	TARA 2024
Internews	547.359.545	(299.093.124)	Internews
OCP	1.188.348.290	1.304.486.795	OCP
Integritas	3.531.721.922	(3.359.593.972)	Integritas
OSF	(2.563.081.149)	2.563.081.149	OSF
TAF DemRes	(118.010.350)	118.010.350	TAF DemRes
TARA 2023	-	1.198.821.998	TARA 2023
Surplus (Defisit) Aktivitas Dengan Pembatasan Tahun Berjalan	-	-	<i>Current Year Surplus (Deficit) of Restricted Activities</i>
Jumlah Aset Neto Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	6.381.472.819	1.574.965.173	<i>Total Net Assets With Restriction From Resources Providers</i>
Jumlah Aset Neto	40.876.142.659	35.318.320.104	<i>Total Net Assets</i>

13 Aset Bersih Yang Dibebaskan Dari Pembatasan			13
	2025	2024	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
IFES	49.251.977	-	IFES
Internews	(299.093.124)	(126.159.071)	Internews
Integritas	(3.359.593.972)	-	Integritas
OSF	2.563.081.149	-	OSF
TAF DemRes	118.010.350	-	TAF DemRes
TARA 2023	1.198.821.998	1.082.865.478	TARA 2023
TARA 2024	-	-	TARA 2024
OCP	-	-	OCP
NDI	-	163.564.294	NDI
Madani	-	154.592.981	Madani
Hivos OC Exit Strategy	-	104.011.630	Hivos OC Exit Strategy
DDP	-	70.914.603	DDP
GIZ PEN Papua	-	60.808.179	GIZ PEN Papua
CLUA Compact	-	11.403.834	CLUA Compact
MSI	-	(104.858.640)	MSI
Jumlah Aset Bersih Yang Dibebaskan Dari Pembatasan	270.478.378	1.417.143.288	<i>Total Net Assets Exempt From Restrictions</i>

Aset bersih terikat merupakan dana yang diterima dari donor dengan pembatasan penggunaan tertentu sesuai dengan perjanjian hibah atau surat komitmen donor. Aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan merupakan bagian dari aset bersih terikat yang telah digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan donor atau pembatasannya telah berakhir. Pada saat dana digunakan untuk kegiatan program atau ketika tujuan donor telah tercapai, jumlah tersebut direklasifikasi dari aset bersih terikat menjadi aset bersih tidak terikat.

Restricted net assets are funds received from donors with certain use restrictions in accordance with the grant agreement or donor commitment letter. The net assets that are exempt from the restriction are part of the bound net assets that have been used in accordance with the donor's set purposes or the limitation has expired. At the time the funds are used for program activities or when the donor's goals have been achieved, the amount is reclassified from restricted net assets to unrestricted net assets.

14 Penerimaan Dana Dengan Pembatasan		Fund Receipts With Restrictions 14	
	2025	2024	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Penerimaan dari Grantor			<i>Receipt from Grantors</i>
FORD	7.262.725.620	-	FORD
IFES	276.832.386	742.617.769	IFES
Internews	547.362.045	1.582.850.708	Internews
OCP	652.938.800	1.593.552.200	OCP
Integritas	4.329.754.669	5.137.253.317	Integritas
TARA 2024	2.731.095.900	2.747.035.800	TARA 2024
TAF DemRes	235.310.013	331.525.000	TAF DemRes
UNODC	485.250.000	-	UNODC
OSF	-	2.418.750.000	OSF
TARA 2023	-	346.558.500	TARA 2023
Jumlah Penerimaan dari Grantors	16.521.269.433	14.900.143.294	<i>Total Receipt from Grantors</i>
Penerimaan Lain-lain dari Program			<i>Other Receipts from Programs</i>
Pendapatan Bunga	129.569.322	52.360.163	Interest Income
Jumlah Penerimaan dari Grantors	129.569.322	52.360.163	<i>Total Other Receipts from Programs</i>
Jumlah Penerimaan Dana Dengan Pembatasan	16.650.838.755	14.952.503.457	<i>Total Fund Receipts With Restrictions</i>
15 Beban Program Dengan Pembatasan		Program Expenses With Restrictions 15	
	2025	2024	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Pengeluaran Program			<i>Program Expenditure</i>
FORD	3.568.273.912	-	FORD
UNODC	485.581.540	-	UNODC
TARA 2024	2.953.551.259	597.293.209	TARA 2024
IFES 2022	-	692.800.743	IFES 2022
IFES 2025	36.232.273	-	IFES 2025
Integritas	798.066.899	6.549.956.643	Integritas
Internews 2023	-	2.082.223.607	Internews 2023
OCP 2024 (Phase 5)	479.946.350	999.363.353	OCP 2024 (Phase 5)
OCP 2025	291.087.621	-	OCP 2025
OSF	2.579.345.897	1.795.914.199	OSF
TAF DemRes	353.383.952	213.830.220	TAF DemRes
TARA 2023	-	1.302.272.815	TARA 2023
OCP 2023 (Phase 4)	-	96.005.000	OCP 2023 (Phase 4)
Internews 2022	-	57.262.311	Internews 2022
OCP 2021 (Phase 3)	-	3.448.501	OCP 2021 (Phase 3)
Lain-lain	28.383.028	13.941.746	Others
Jumlah Beban Program Dengan Pembatasan	11.573.852.731	14.404.312.347	<i>Total Program Expenses With Restrictions</i>

16 Penerimaan Operasional Tanpa Pembatasan		Operating Income Without Restrictions		16
	2025	2024		
Akun ini terdiri dari:			This account consists of:	
Kontribusi	4.670.723.066	4.913.804.157	Contribution	
Fundraising	259.071.641	388.283.712	Fundraising	
Merchandise ICW	67.707.548	165.321.434	ICW Merchandise	
Investasi	253.950.000	313.273.489	Investment	
Pendapatan Bunga	289.569.247	242.092.115	Interest Income	
Bunga Pinjaman Perorangan	13.699.112	8.658.412	Personal Loan Interest Income	
Selisih Kurs	-	157.549.201	Foreign Exchange	
Jumlah Penerimaan Operasional Tanpa Pembatasan	5.554.720.614	6.188.982.520	Total Operating Income Without Restrictions	
17 Beban Operasional Tanpa Pembatasan		Operating Expenses Without Restrictions		17
	2025	2024		
Akun ini terdiri dari:			This account consists of:	
Pengeluaran Program			Program Expenditure	
Fundraising	-	-	Fundraising	
Pengeluaran Program Pendukung			Support Program Expenditure	
Honorarium/Fee	63.878.141	88.921.517	Honorarium/Fee	
Meeting Packages	59.268.944	159.992.840	Meeting Packages	
Campaign	64.500.130	195.042.540	Campaign	
Expenditure Program			Expenditure Program	
Asuransi Kesehatan	62.142.554	251.499.982	Health Insurance	
Staff Development	-	16.301.900	Staff Development	
Biaya Transportasi	586.463.458	733.711.605	Transportation	
Biaya Airfare	10.055.000	16.009.918	Airfare	
Biaya Perdiem	12.090.000	14.225.000	Perdiem	
Biaya Akomodasi	17.690.482	8.823.986	Accommodation	
Biaya Perlengkapan Kantor	6.435.055	-	Office Supplies	
Biaya Komunikasi	55.987.535	-	Communication	
Biaya Utilities	6.899.063	-	Utilities	
Biaya Cetak	6.161.997	-	Materials	
Biaya Jasa Profesional	-	109.945.000	Professional Services	
Biaya Dokumentasi	7.162.000	-	Documentation	
Biaya ATK	218.520	-	Stationery	
Biaya Remitansi	100.000	-	Remittance Expense	
Personil dan Organisasi	2.695.676.716	2.772.695.219	Personnel and Organization	
Asuransi Pensiun	84.912.425	111.456.103	Pension Insurance	
Biaya Administrasi dan Umum	17.336.800	21.820.000	General Expense	
Biaya Penyusutan	1.378.192.752	1.381.277.171	Depreciation Expense	
Biaya Pajak	181.414.923	297.217.173	Tax Expense	
Investasi - Barang Dagangan	15.297.544	126.320.742	ICW Merchandise	
Investasi - Peralatan	-	46.927.000	Equipments - Investment	
Investasi	-	-	Investment	
Beban Kerugian Selisih Kurs	-	3.123.072	Foreign Expense	
Biaya Lain-lain	-	357.479.218	Others Expense	
Biaya Lain-lain			Other Expenses	
Biaya Bank	70.566.350	60.548.975	Bank Expense	
Jumlah Beban Operasional Tanpa Pembatasan	5.402.450.389	6.773.338.961	Total Operating Expenses Without Restrictions	

18 PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN APPROVAL OF ISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS 18

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diselesaikan pada tanggal 26 Mei 2026

Company management is responsible for the preparation of financial statements as of December 31, 2025 which was completed on May 26 2026

19 SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI THE MAIN SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY 19

Dalam penyusunan laporan keuangan, Perusahaan menggunakan basis estimasi dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perusahaan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

In the preparation of financial statements, the company uses an estimated base and consideration to determine the balances in the financial statements. The estimation and consideration used continues to be evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Although the estimation and consideration are prepared based on the company's best knowledge of the current events and conditions, the results that arise may be different from the original estimation. The following is an explanation of the nature of several accounts that use estimates and considerations significantly, while related to presentation and balance can be seen in relevant notes.

Penyusutan

Perusahaan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perusahaan mereview umur manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Depreciation

The company recognizes the depreciation burden of fixed assets based on the estimated benefits of benefit based on a depreciation method as described in the accounting policy applied. The depreciation method is determined based on the pattern of economic use of assets in the future. At the end of each year, the company reviews the age of the benefits, the residual value and the depreciation method to get the most optimal estimation base.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1070/KM.1/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN PUBLIK
HARY SUGANDA, S.E., Ak., CPA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Publik Hary Suganda, S.E., Ak., CPA telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Hary Suganda, S.E., Ak., CPA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN PUBLIK HARY SUGANDA, S.E., Ak., CPA.
- PERTAMA : Memberikan perpanjangan Izin Akuntan Publik kepada Hary Suganda, S.E., Ak., CPA, dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0533.
- KEDUA : Perpanjangan Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 888/KM.1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Hary Suganda, S.E., Ak., dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
 3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
 4. Akuntan Publik Hary Suganda, S.E., Ak., CPA.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

HERU PAMBUDI, S.E., L.L.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 568/KM.1/2024**

TENTANG

**IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KUMALAHADI, SUGENG PAMUDJI DAN REKAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan di Sleman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI, SUGENG PAMUDJI DAN REKAN.**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha kepada Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan yang berbentuk usaha Persekutuan dan berkedudukan di Sleman.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
4. Pimpinan Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan di Sleman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

a.n. **MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,**



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMBUDI, S.E., L.L.M.





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 588/KM.1/2024
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN CABANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KUMALAHADI, SUGENG PAMUDJI DAN REKAN DI DEPOK**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa permohonan Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan di Depok telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Pendirian Cabang KAP Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan di Depok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN CABANG KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI, SUGENG PAMUDJI DAN REKAN DI DEPOK.
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan di Depok kepada Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan yang berkedudukan di Sleman.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
 3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 4. Pemimpin KAP Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan di Sleman ; dan
 5. Pemimpin Cabang KAP Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan di Depok.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2024

a.n. **MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,**



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMBUDI, S.E., L.L.M.





INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesia Institute of Certified Public Accountants



0025-03/CFI/2024

Menyatakan bahwa
This is to certify that



HARY SUGANDA

telah lulus Ujian Sertifikasi Finansial Investigator untuk Akuntan Publik dan telah memenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagai
has successfully passed the Financial Investigator examination for Public Accountants and has complied with all provisions and requirements prescribed by the statute to admit as

Certified Financial Investigator

dan terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia serta dikukuhkan untuk menyandang dan menggunakan gelar tersebut.
and registered as such by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants with all rights and obligations and is empowered to assume such title.

Sertifikat ini diberikan di Jakarta, pada tanggal 31 Mei 2024
This certificate is granted in Jakarta, this 31st day of May 2024

Aria Kanaka, M.Ak, CA, CPA
Ketua Dewan Sertifikasi
Chairman of Certification Board

Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA, CPMA, FCPA (Aust.)
Ketua Umum
President



**SURAT TANDA TERDAFTAR
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Nomor: 541/STT/X/2024

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik di BPK diberikan kepada **Kantor Akuntan Publik KAP Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan** sebagai Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditugaskan sesuai dengan hak dan segala kewajibannya yang melekat kepadanya serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara;
4. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; dan
6. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat Tanda Terdaftar ini, maka BPK dapat meninjau kembali.

Jakarta, 02 Oktober 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara
Kepala Direktorat,

Ikhtaria Syaziah S.E., Ak., MBA., ERMAP, CSFA, CFrA
NIP 197311151997032002

Tembusan, Yth.:

1. Ketua BPK RI
2. Wakil Ketua BPK RI
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Menteri Dalam Negeri
6. Kepala Ditama Renvaja BPK RI
7. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia

**SURAT TANDA TERDAFTAR
KANTOR AKUNTAN PUBLIK OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: STTD.KAP-38/PM.021/2024**

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan diberikan kepada:

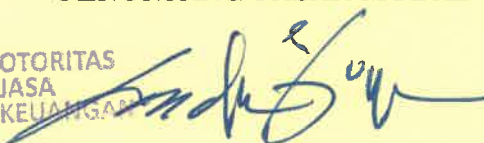
KAP KUMALAHADI, SUGENG PAMUDJI DAN REKAN

sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2024

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR PERIZINAN PERORANGAN,
PROFESI PENUNJANG, DAN LEMBAGA
PENUNJANG PASAR MODAL



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

MUHAMAD ADI WIJOYO